



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
UNIT KERJA : DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TRI MULYAWATI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 727830

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.282.523.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m²/36 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 98.784.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m²/183 m² di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 954.639.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 172 m²/48 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , WARISAN Rp. 1.229.100.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 155.050.000

1. MOTOR, HONDA NC11B3C A/T/SOLO Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOTOR, HONDA X1BO2N04LO A/T/SOLO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 8.750.000
3. MOTOR, HONDA Y1G02N02LO A/T/SOLO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 8.300.000
4. MOBIL, DAIHATSU F700RG-TX MT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 132.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 6.859.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 383.371.636

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.827.803.636

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.827.803.636



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.